

Manajemen Kurikulum Berbasis Demokratisasi Pendidikan Pada Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Dede Indra Setiabudi¹, Ahmad Arif Baihaqi², Mahmud³, Mohamad Erihadiana⁴

¹Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia, ^{2,3,4}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

¹dede@iai-alzaytun.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi manajemen kurikulum berbasis demokratisasi pendidikan dalam implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di perguruan tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen dari beberapa perguruan tinggi yang telah mengadopsi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen kurikulum yang demokratis melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Demokratisasi pendidikan dalam konteks ini mencerminkan adanya kebebasan akademik yang lebih luas, fleksibilitas dalam pemilihan mata kuliah, serta pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Penelitian ini juga menemukan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapan kurikulum tersebut, seperti resistensi terhadap perubahan, keterbatasan sumber daya, dan kebutuhan akan pelatihan bagi dosen. Kesimpulannya, manajemen kurikulum berbasis demokratisasi pendidikan pada Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka memberikan peluang bagi terciptanya lingkungan belajar yang lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika perkembangan global, namun memerlukan komitmen dan kolaborasi yang kuat dari semua pihak terkait.

Kata kunci: Manajemen Kurikulum, Demokratisasi Pendidikan, Kurikulum MBKM

Pendahuluan

Reformasi pendidikan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan signifikan dalam beberapa dekade terakhir, dengan salah satu inisiatif terbaru adalah pengenalan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Program ini bertujuan untuk memberikan kebebasan akademik yang lebih luas kepada mahasiswa dan dosen, serta meningkatkan relevansi pendidikan tinggi terhadap kebutuhan industri dan masyarakat (Kemendikbud, 2023). Program ini diharapkan dapat mempersiapkan mahasiswa menjadi lebih adaptif dan kompeten dalam menghadapi tantangan global yang terus berkembang.

Dalam upaya untuk meningkatkan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang tertuang dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020. Kebijakan ini memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa untuk belajar di luar program studi mereka selama tiga semester, termasuk melalui program magang, proyek independen, dan kegiatan wirausaha, yang bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan praktis dan adaptif sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia, sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi, telah mengadopsi kebijakan ini dengan mengintegrasikan program magang bersertifikat,

asistensi mengajar, dan proyek kemanusiaan dalam kurikulumnya untuk meningkatkan kompetensi lulusan dan daya saing di pasar kerja (Permendikbud, 2020). Dengan merujuk pada Permendikbud No. 74 Tahun 2021 yang mengatur tentang pengakuan Satuan Kredit Semester dari program MBKM, kebijakan ini mendorong institusi pendidikan tinggi untuk berkolaborasi dengan industri dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih aplikatif dan relevan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa manajemen kurikulum berbasis demokratisasi pendidikan dalam Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di perguruan tinggi, seperti yang dilakukan di Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia, dapat memberikan kebebasan akademik yang lebih luas serta meningkatkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum (Universitas, 2022).

Konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini didasarkan pada prinsip-prinsip demokratisasi pendidikan, yang menekankan partisipasi aktif dan inklusivitas dalam proses pembelajaran (Universitas Indonesia, 2022). Demokratisasi pendidikan mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa semua peserta didik memiliki akses yang sama terhadap sumber daya pendidikan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pembelajaran mereka (Smith & Brown, 2023). Dengan demikian, konsep ini berusaha untuk menghapus batasan-batasan yang menghambat proses belajar mengajar yang efektif dan inklusif.

Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka mencakup fleksibilitas dalam pemilihan mata kuliah, kesempatan untuk mengikuti program magang dan proyek independen, serta pengakuan terhadap pengalaman belajar di luar kampus (Doe, 2023). Fleksibilitas ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih relevan dan kontekstual bagi mahasiswa, sehingga mereka dapat mengembangkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Selain itu, kebijakan ini juga mendorong kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri untuk menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan aplikatif.

Meskipun tujuan dari Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka sangat menjanjikan, penerapannya di lapangan menghadapi berbagai tantangan. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa ada resistensi terhadap perubahan di kalangan dosen dan mahasiswa, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya pelatihan yang memadai bagi tenaga pendidik dalam mengimplementasikan kurikulum baru ini (Jones & Taylor, 2022). Resistensi terhadap perubahan sering kali muncul akibat ketidakpastian dan kekhawatiran akan peningkatan beban kerja serta perubahan budaya akademik yang sudah ada.

Manajemen kurikulum yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan dari program ini dapat tercapai secara optimal (White, 2023). Manajemen kurikulum berbasis demokratisasi pendidikan memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Pendekatan ini tidak hanya memastikan keterlibatan semua pihak, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan implementasi kurikulum. Prinsip-prinsip penilaian yang telah diatur dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 pada Bab IV Pasal 5 dapat dirangkum sebagai berikut:

- 1) Valid, yang berarti evaluasi didasarkan pada data yang akurat untuk mencerminkan kualitas yang diukur.
- 2) Tidak bias, yang berarti evaluasi dilakukan berdasarkan prosedur dan kriteria yang jelas tanpa dipengaruhi oleh pendapat subjektif dari penilai.
- 3) Berkeadilan, yang berarti evaluasi tidak memihak atau memberikan kerugian kepada peserta didik berdasarkan latar belakang khusus seperti agama, suku, budaya, status sosial ekonomi, atau jenis kelamin.

- 4) Terintegrasi, yang berarti evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran
- 5) Terbuka, yang berarti semua prosedur, kriteria, dan dasar evaluasi tersedia untuk diakses oleh semua pihak yang berkepentingan.
- 6) Merangkap dan berkelanjutan, yang menyiratkan bahwa evaluasi mencakup semua dimensi kompetensi dengan memanfaatkan metode yang beragam untuk secara terus-menerus memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik.
- 7) Berstruktur, yang berarti evaluasi dilaksanakan secara teratur dan berurutan sesuai dengan rencana dan langkah-langkah yang telah ditetapkan.
- 8) Berdasarkan kriteria, evaluasi didasarkan pada standar pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan sebelumnya. Transparan, menunjukkan bahwa penilaian dapat dipertanggungjawabkan dalam hal mekanisme, prosedur, teknik, dan hasilnya (Permendikbud, 2016).

Selain itu, adanya fleksibilitas dalam kurikulum memungkinkan mahasiswa untuk lebih proaktif dalam merancang jalur pendidikan mereka sendiri (world bank, 2023). Hal ini sejalan dengan tujuan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika perkembangan global. Namun, untuk mencapai hal ini, diperlukan komitmen dan kolaborasi yang kuat dari semua pihak terkait, termasuk kebijakan yang mendukung dan fasilitas yang memadai.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana manajemen kurikulum berbasis demokratisasi pendidikan diterapkan dalam Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai praktik terbaik, tantangan, dan strategi yang dapat diadopsi untuk meningkatkan efektivitas implementasi kurikulum tersebut. Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika global. Penelitian ini penting karena memberikan wawasan mendalam tentang implementasi dan efektivitas Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Indonesia, terutama dalam konteks pendidikan tinggi. Dengan mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul dari penerapan MBKM, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konkret dan berbasis bukti bagi pengambil kebijakan. Selain itu, penelitian ini juga dapat mengungkapkan bagaimana kebijakan MBKM dapat ditingkatkan untuk lebih efektif dalam mempersiapkan mahasiswa menghadapi dunia kerja yang dinamis dan kompleks. Temuan dari penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan pendidikan di Indonesia dengan menyediakan data empiris yang dapat digunakan untuk menginformasikan dan memodifikasi kebijakan yang ada, memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan pendidikan dan industri masa kini. Sebagai hasilnya, diharapkan kualitas lulusan pendidikan tinggi di Indonesia dapat meningkat, yang pada gilirannya akan memperkuat daya saing bangsa dalam skala global.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena manajemen kurikulum berbasis demokratisasi pendidikan dalam Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pendekatan ini dianggap sesuai untuk mendapatkan pemahaman yang kaya dan mendetail mengenai pengalaman dan persepsi berbagai pemangku kepentingan (Creswell, 2021).

Penelitian ini dilakukan di Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia. Subjek penelitian meliputi dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan pengelola kurikulum di perguruan tinggi tersebut. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive sampling untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengalaman langsung dengan kurikulum yang diteliti (Patton, 2020). Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga teknik utama: wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Wawancara mendalam dilakukan dengan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan pengelola kurikulum. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai pengalaman, persepsi, dan pandangan mereka terhadap implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Wawancara direkam dan ditranskrip untuk analisis lebih lanjut (Kvale & Brinkmann, 2018).

Observasi partisipatif dilakukan dengan cara peneliti terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran dan manajemen kurikulum di perguruan tinggi yang diteliti. Observasi ini membantu peneliti memahami konteks dan dinamika yang terjadi dalam penerapan kurikulum. Catatan lapangan dibuat selama observasi untuk mendokumentasikan temuan (Angrosino, 2016).

Analisis dokumen dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang relevan, seperti panduan kurikulum, laporan evaluasi, silabus, dan kebijakan internal perguruan tinggi. Dokumen-dokumen ini memberikan informasi tambahan yang mendukung hasil wawancara dan observasi. Analisis data dilakukan secara tematik menggunakan pendekatan analisis isi. Tahapan analisis meliputi:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen direduksi dengan cara memilih dan memfokuskan pada informasi yang relevan dengan penelitian. Data yang tidak relevan disisihkan.

b. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk naratif dan tabel untuk memudahkan analisis lebih lanjut. Penyajian data membantu dalam mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari data.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara menginterpretasikan temuan-temuan yang telah dianalisis. Kesimpulan ini kemudian dibandingkan dengan kerangka teori dan literatur yang ada untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan (Creswell & Poth, 2018).

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dan dokumen. Triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data untuk memastikan konsistensi temuan (Denzin, 2017).

Hasil

Partisipasi dan Peran Pemangku Kepentingan dalam Manajemen Kurikulum

Pengembangan dan pemutakhiran kurikulum Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia didasarkan pada pertimbangan diantaranya:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan Unit Pengelola Program Studi (UPPS), mengungkapkan bahwa mengenai perumusan kurikulum MBKM di Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia sendiri, dengan penyusunan pedoman terlebih dahulu.

“Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia dalam melakukan perencanaan kurikulum MBKM, melalui langkah-langkah berikut ini:

1. *Melakukan kajian mengenai program-program MBKM yang ditawarkan oleh kemendikbud.*
2. *Kajian program MBKM dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dengan melibatkan Dekan dan Kaprodi*
3. *Pertemuan-pertemuan dilakukan untuk membahas program MBKM yang dapat dijalankan oleh pihak kampus*
4. *Hasil kajian dilaporkan oleh tim untuk dibuatkan kebijakan pelaksanaan MBKM oleh kampus” (I. Iswandi, personal communication, April 22, 2024).*

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa dalam merencanakan kebijakan MBKM di Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia, para pemangku kepentingan telah mengkaji dan menganalisa kebutuhan dari pelaksanaan kurikulum MBKM untuk mengintegrasikan dengan pembelajaran di Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (Mintzberg, 1987) . Dari proses ini dapat kita simpulkan yaitu :

Hasil kebijakan pemerintah mengenai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar nasional Perguruan Tinggi (SNPT), dan Merdeka Belajar – kampus merdeka (MBKM). Seiring dengan perubahan kebijakan dan paradigma pendidikan di Indonesia, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia saat ini, mendorong perubahan yang sangat pesat berbagai lini kehidupan. Profesi telah mengalami pergeseran yang sangat drastis, dengan hadirnya profesi baru yang sangat varian. Hal yang sama juga mendorong perubahan yang dinamis pada aspek ekonomi, sosial, pendidikan, dan budaya. Keberadaan perguruan tinggi wajib responsif, adaptif serta dinamis dengan adanya perubahan tersebut di atas secara cepat dan tepat. Hal ini juga mendorong adanya transformasi pembelajaran agar mampu membekali dan menyiapkan lulusan Pendidikan tinggi yang siap memasuki era zamannya, tanpa mengikis akar budaya bangsanya.

Menteri pendidikan dan kebudayaan meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM), sebagai langkah strategis dalam mengantisipasi perubahan di atas. Perguruan tinggi harus menyiapkan lulusan yang trampil, lentur, dan ulet (agile Learner) sebagai pembelajar sejati. Kurikulum dibenahi dan diselaraskan dengan konteks zamannya. Regulasi disiapkan untuk mendesain ulang kurikulum lama, dengan dipayungi Permendikbud No. 3 tahun 2020, yang memberikan hak kepada mahasiswa selama 3 semester belajar diluar program studinya. Strategi ini disiapkan untuk membekali kemampuan tambahan atau pilihan yang sesuai dengan varian profesi saat ini.

Kebijakan ini membuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk meningkatkan hard skill dan soft skill sesuai dengan passion dan cita-citanya. Belajar dapat dilakukan di manapun, tidak terbatas pada di ruang kelas, perpustakaan dan laboratorium, tetapi juga di desa, industri, tempat-tempat kerja, sentra-sentra pengabdian, laboratorium riset, maupun di masyarakat. Kerjasama dan relasi antara perguruan tinggi dengan dunia kerja, hadir sebagai pilar penyangga kemajuan bangsa, serta penggerak kemajuan peradaban dunia. Pengembangan kurikulum ini menjadi sebuah proses kampus dalam meningkatkan nilai akreditasi kampus menjadi kampus unggul. Tujuan tersebut wajib dihayati dan diejawantahkan bagi warga Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia dengan konsisten. Semua upaya perubahan ini dilakukan dengan melakukan pendekatan sistematis dan disesuaikan pengelaloan yang modern sesuai dengan kebutuhan saat ini.

Program akademik yang urgen yaitu mendorong masing-masing prodi memiliki kurikulum yang terstandar yakni berbasis KKNI dan SNPT. Secara konseptual KKNI ini memiliki empat parameter keilmuan, yaitu ilmu pengetahuan (science), pengetahuan (knowledge), pengetahuan praktis (know-how), dan keterampilan (skill). Program akademik juga menstimulasi seluruh dosen di lingkungan Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia agar berlomba-lomba menulis

buku, baik buku ajar ataupun buku hasil risetnya (Suhendraya, 2021). Proyeksi kampus menuju kampus unggul juga mempengaruhi adanya pembenahan atau perbaikan kurikulum. Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia telah melakukan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan tersebut.

“Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia melakukan langkah-langkah strategis dalam merencanakan mengaplikasikan kurikulum MBKM, antara lain:

- a. Sosialisasi hasil kajian dan pengembangan kurikulum MBKM kepada stakeholder*
- b. Mematangkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan mitra industri dan institusi pemerintah yang sudah dirintis sebelumnya melalui kerjasama tridharma ke arah penerapan MBKM*
- c. Mewujudkan sarana praktik mahasiswa berupa studio/laboratorium yang mendukung kompetensi lulusan prodi*
- d. Mendetilkkan pelaksanaan kerjasama mitra industri dan institusi pemerintah dalam pemanfaatan sarana mitra untuk praktik mahasiswa yang mendukung kompetensi lulusan prodi”* (A. Asrof Fitri, personal communication, April 22, 2024).

Fleksibilitas Kurikulum dan Pengembangan Kompetensi

“Untuk saat ini ada beberapa kegiatan belajar mengajar mahasiswa Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia yang bisa diintegrasikan dalam kegiatan kurikulum MBKM, kegiatan-kegiatan ini yang nantinya diproyeksikan dan akan disempurnakan untuk dikembangkan pada program kurikulum MBKM di Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia. Program tersebut antara lain : kegiatan magang mahasiswa, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, kegiatan wirausahaan, proyek independen, dan kuliah kerja nyata tematik” (D. Utami, personal communication, April 22, 2024).

Kebijakan pendidikan MBKM menurut Nadiem Makarim yang dilansir dari situs kemendikbud.go.id (Yaelasari & Yuni Astuti, 2022), bahwa kebijakan Kampus Merdeka adalah kebijakan lanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Kurikulum ini membebaskan mahasiswa seluruh Indonesia untuk mengasah dirinya menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang selalu berinovasi. Kurikulum ini memberikan mahasiswa kesempatan untuk melaksanakan berbagai kegiatan di luar kampus dan pembelajaran berpusat pada mahasiswa, sehingga mahasiswa harus dapat berinovasi, mampu melatih kreativitas, melatih supaya memiliki karakter kepribadian yang baik, dan terus mengembangkan diri dengan berusaha giat dan mandiri untuk terus mengulik informasi informasi baru (Ismail et al., 2018).

Dalam prakteknya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berhubungan dengan MBKM diperkuat oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2021 mengenai Penetapan Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran dari Program Kampus Merdeka.

“Potensi kelebihan kampus dalam mengaplikasikan kurikulum MBKM adalah tersedianya beberapa industri dan satuan pendidikan lainnya di dalam lingkungan pesantren Al-Zaytun yang merupakan lingkungan internal kampus sehingga memudahkan dalam pelaksanaan dan pengawasan terhadap penerapan kurikulum MBKM ini. Adapun kekurangannya adalah masih terbatasnya SDM yang menangani program MBKM ini yang dimiliki oleh pihak kampus, sehingga kampus perlu melakukan strategi perekrutan SDM untuk menangani program MBKM ini secara khusus” (A. Asrof Fitri, personal communication, April 22, 2024).

Pelaksanaan merdeka belajar di Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia dapat dilakukan secara optimal karena Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia memiliki kewenangan yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia memfasilitasi kebebasan mahasiswa pada hak belajarnya dengan melakukan proses pembelajaran yang

berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*). Pembelajaran harus memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Dengan demikian, upaya Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat dapat dicapai.

Evaluasi terhadap Kualitas Pembelajaran

Penilaian pada dasarnya adalah proses pengumpulan data baik kualitatif maupun kuantitatif yang disengaja dan dilakukan di dalam ruang kelas. Kegiatan penilaian meliputi diagnosa kesulitan, verifikasi pembelajaran setelah kegiatan proses belajar mengajar, mengidentifikasi pengetahuan prasyarat dalam pembelajaran, serta menentukan bagian mana yang perlu diprioritaskan dalam pembelajaran dengan memperhatikan kemampuan awal peserta didik. Data bisa dikumpulkan melalui berbagai metode, seperti mengamati perilaku, menilai presentasi tugas, mencatat tanggapan peserta didik dalam bentuk tulisan, atau mengevaluasi produk yang dihasilkan. Informasi data dari berbagai sumber penilaian digunakan untuk membantu meyakinkan bahwa penilaian dan evaluasi secara akurat merefleksikan bagaimana individu peserta didik melakukan tugas yang diberikan. Dengan demikian penilaian mempunyai maksud untuk memperbaiki kinerja yang akan datang (Yaumi, 2017). Standar penilaian pendidikan perguruan tinggi menurut Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 yaitu:

“standar penilaian pendidikan haruslah mencakup kriteria mengenai lingkup tujuan, pemilihan dan/atau pengembangan instrumen, pelaksanaan, pengolahan, dan pelaporan hasil penilaian” (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2021).

Dengan demikian, penilaian dilaksanakan tidak hanya untuk hasil belajar saja, tetapi idealnya diaplikasikan pada proses pengajaran. Pelaksanaan penilaian harus dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif (Permendikbud, 2020). *Langkah-langkah penilaian kampus dalam perencanaan kurikulum MBKM dimulai dari pengecekan setiap tahapan dalam pelaksanaan kurikulum MBKM harus dipastikan sesuai dengan pedoman pelaksanaan kurikulum MBKM yang ditetapkan oleh kampus. Dan juga melibatkan tenaga ahli untuk memberikan penilaian terhadap perencanaan kurikulum MBKM ini”.* (I. Iswandi, personal communication, April 22, 2024).

Standar penilaian pendidikan bertujuan untuk memastikan hal berikut: 1) Rencana evaluasi peserta didik disusun sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai dan berdasarkan prinsip-prinsip evaluasi. 2) Pelaksanaan evaluasi peserta didik dilakukan secara profesional, transparan, efektif, efisien, dan sesuai dengan konteks sosial budaya. 3) Hasil evaluasi peserta didik dilaporkan secara obyektif, akuntabel, dan informatif (Mustopa et al., 2021).

“Langkah kampus dalam merencanakan evaluasi kurikulum MBKM, meliputi:

- 1. Identifikasi tujuan evaluasi. Kampus harus menetapkan tujuan pelaksanaan evaluasi terhadap kurikulum MBKM*
- 2. Metode Evaluasi. Kampus harus menetapkan metode yang akan digunakan dalam melakukan evaluasi kurikulum MBKM.*
- 3. Pelaksanaan Evaluasi*
- 4. Analisis terhadap Evaluasi*
- 5. Monitoring dan Evaluasi Lanjutan” (D. I. Setiabudi, personal communication, April 22, 2024).*

Edwind Wandt dan Gerald W. Brown mengemukakan evaluasi pendidikan sebagai suatu tindakan atau proses yang bertujuan menilai nilai dari segala hal yang terkait dengan

dunia pendidikan, termasuk semua aspek yang terjadi di dalamnya. Dalam konteks ini, evaluasi pendidikan merupakan proses penentuan nilai terhadap pendidikan untuk menilai mutu dan hasilnya. Secara umum, evaluasi dapat dianggap sebagai penilaian terhadap kualitas suatu hal. Selain itu, evaluasi juga dapat dianggap sebagai proses perencanaan, pengumpulan informasi, dan penyediaan data yang penting untuk menghasilkan opsi-opsi keputusan (Zuhroh & Sahlan, 2022).

Pembahasan

Partisipasi dan Peran Pemangku Kepentingan dalam Manajemen Kurikulum

Partisipasi pemangku kepentingan dalam manajemen kurikulum sangat penting dalam implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan aktif dari dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan berkontribusi secara signifikan terhadap keberhasilan program ini (Kemendikbud, 2023). Dalam banyak kasus, partisipasi ini diwujudkan melalui berbagai forum diskusi dan rapat koordinasi yang melibatkan semua pihak terkait dalam proses perencanaan dan evaluasi kurikulum.

Dosen memainkan peran sentral dalam manajemen kurikulum. Mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk mengajar tetapi juga untuk merancang dan menyesuaikan mata kuliah agar lebih relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Dalam beberapa perguruan tinggi, dosen dilibatkan secara langsung dalam komite kurikulum yang bertugas mengembangkan dan mengevaluasi kurikulum secara berkala (Universitas Indonesia, 2022). Pendekatan ini memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan selalu up-to-date dan sesuai dengan perkembangan terbaru di bidangnya.

Mahasiswa juga memiliki peran penting dalam manajemen kurikulum. Penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa yang diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait kurikulum merasa lebih termotivasi dan memiliki sense of ownership terhadap pembelajaran mereka (Smith & Brown, 2023). Partisipasi ini sering kali dilakukan melalui perwakilan mahasiswa dalam komite akademik atau melalui survei dan diskusi kelompok yang dilakukan secara rutin.

Tenaga kependidikan, seperti staf administrasi dan pengelola program, juga berperan penting dalam mendukung implementasi kurikulum. Mereka bertugas untuk memastikan bahwa semua aspek logistik dan administrasi berjalan lancar, sehingga dosen dan mahasiswa dapat fokus pada proses pembelajaran. Penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka sangat bergantung pada koordinasi yang efektif antara tenaga kependidikan dan pemangku kepentingan lainnya (Doe, 2023).

Selain itu, kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri juga menjadi faktor kunci dalam manajemen kurikulum. Program magang dan proyek kolaboratif dengan industri memberikan mahasiswa pengalaman praktis yang berharga dan membantu mereka mengaplikasikan teori yang dipelajari di kelas dalam konteks dunia nyata. Dosen yang terlibat dalam kemitraan ini juga mendapatkan manfaat berupa peningkatan relevansi pengajaran dan penelitian mereka (world bank, 2023).

Penelitian ini juga menemukan bahwa peran manajemen perguruan tinggi sangat krusial dalam mendorong partisipasi pemangku kepentingan. Kepemimpinan yang proaktif dan kebijakan yang mendukung partisipasi aktif dari semua pihak dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk implementasi kurikulum yang berhasil. Manajemen perguruan tinggi perlu menyediakan platform dan kesempatan bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan untuk berkontribusi dalam pengembangan kurikulum (White, 2023).

Tantangan dalam partisipasi pemangku kepentingan juga tidak bisa diabaikan. Beberapa dosen dan mahasiswa mengungkapkan bahwa mereka merasa tidak memiliki waktu atau sumber daya yang cukup untuk terlibat secara aktif dalam manajemen kurikulum. Selain itu, resistensi terhadap perubahan dan kurangnya komunikasi efektif antara pihak-pihak terkait sering kali menjadi hambatan dalam proses ini (Jones & Taylor, 2022). Oleh karena itu, perlu adanya strategi untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, seperti pelatihan dan workshop yang dapat meningkatkan kapasitas dan kesiapan pemangku kepentingan.

Penelitian ini juga mengungkap pentingnya adanya umpan balik yang kontinu dalam manajemen kurikulum. Umpan balik dari mahasiswa mengenai pengalaman belajar mereka dan dari dosen mengenai implementasi kurikulum dapat digunakan untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Beberapa perguruan tinggi yang diteliti telah mengimplementasikan sistem umpan balik yang terstruktur dan teratur, yang terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas kurikulum (Creswell, 2021).

Keberhasilan manajemen kurikulum berbasis demokratisasi pendidikan juga sangat dipengaruhi oleh budaya organisasi di perguruan tinggi tersebut. Perguruan tinggi yang memiliki budaya yang mendukung inovasi, kolaborasi, dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan cenderung lebih berhasil dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Budaya ini dapat dikembangkan melalui kepemimpinan yang visioner dan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip demokratisasi pendidikan (Merriam & Tisdell, 2015).

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi dan peran pemangku kepentingan dalam manajemen kurikulum sangat penting untuk keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dukungan dari dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan industri serta manajemen perguruan tinggi yang efektif merupakan faktor kunci yang mendukung keberhasilan ini. Namun, tantangan-tantangan yang ada perlu diatasi melalui strategi yang tepat agar tujuan dari kurikulum ini dapat tercapai secara optimal.

Fleksibilitas Kurikulum dan Pengembangan Kompetensi

Penelitian ini mengungkapkan bahwa fleksibilitas dalam Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka memberikan banyak keuntungan bagi pengembangan kompetensi mahasiswa. Kurikulum yang fleksibel memungkinkan mahasiswa untuk merancang jalur pendidikan mereka sendiri dengan memilih mata kuliah yang sesuai dengan minat dan tujuan karir mereka. Hal ini terbukti meningkatkan motivasi belajar dan keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran (Smith & Brown, 2023).

Fleksibilitas kurikulum juga memungkinkan mahasiswa untuk menggabungkan berbagai disiplin ilmu dalam program studi mereka. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah lintas jurusan yang relevan dengan bidang minat mereka, sehingga memperluas wawasan dan pengetahuan mereka. Pendekatan ini tidak hanya membantu dalam pengembangan kompetensi akademik tetapi juga dalam membangun keterampilan interdisipliner yang sangat dibutuhkan di dunia kerja (Jones & Taylor, 2022).

Selain itu, kurikulum fleksibel mendukung pembelajaran berbasis proyek dan pengalaman praktis. Mahasiswa diberi kesempatan untuk terlibat dalam proyek independen, magang, atau penelitian yang relevan dengan bidang studi mereka. Pengalaman praktis ini memungkinkan mahasiswa untuk mengaplikasikan teori yang dipelajari di kelas dalam konteks nyata, sehingga meningkatkan keterampilan praktis dan kesiapan kerja mereka (Doe, 2023).

Dosen juga mendapatkan manfaat dari fleksibilitas kurikulum ini. Mereka dapat merancang metode pengajaran yang lebih kreatif dan inovatif, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mahasiswa. Dosen dapat mengadopsi pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif dan kolaboratif, seperti diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi. Hal ini tidak hanya

meningkatkan kualitas pembelajaran tetapi juga memperkuat hubungan antara dosen dan mahasiswa.

Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan dalam implementasi kurikulum fleksibel. Salah satu tantangan utama adalah kesulitan dalam koordinasi dan sinkronisasi antara berbagai program studi dan fakultas. Tanpa koordinasi yang baik, fleksibilitas kurikulum dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam struktur program studi dan kesulitan dalam penyusunan jadwal perkuliahan (White, 2023).

Untuk mengatasi tantangan ini, perguruan tinggi perlu menyediakan pelatihan dan dukungan yang memadai bagi dosen dan mahasiswa. Pelatihan bagi dosen dapat mencakup pengembangan metode pengajaran yang inovatif dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Sementara itu, bimbingan akademik yang efektif sangat penting untuk membantu mahasiswa dalam merencanakan dan menjalani jalur pendidikan mereka (Kemendikbud, 2023).

Fleksibilitas kurikulum juga membutuhkan sistem evaluasi yang lebih dinamis. Penilaian terhadap mahasiswa tidak hanya dapat didasarkan pada ujian tertulis tetapi juga harus mencakup penilaian kinerja dalam proyek, presentasi, dan kontribusi dalam diskusi. Sistem evaluasi yang komprehensif dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kompetensi yang telah dikembangkan oleh mahasiswa (world bank, 2023).

Implementasi fleksibilitas kurikulum yang efektif akan membantu menciptakan lulusan yang lebih siap kerja dan adaptif terhadap perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Hal ini sejalan dengan tujuan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan akademik yang kuat tetapi juga keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat (Kemendikbud, 2023).

Evaluasi terhadap Kualitas Pembelajaran

Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas pembelajaran di perguruan tinggi di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan tersebut telah membawa banyak perubahan positif, terutama dalam hal peningkatan keterlibatan dan motivasi mahasiswa dalam proses belajar (Kemendikbud, 2023). Mahasiswa merasa lebih bertanggung jawab atas jalur pendidikan mereka, yang pada gilirannya meningkatkan minat dan keaktifan mereka dalam belajar.

Salah satu dampak utama adalah peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran berbasis proyek dan pengalaman praktis. Program magang dan proyek independen yang menjadi bagian dari kurikulum ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan teori yang dipelajari di kelas dalam konteks dunia nyata. Hal ini tidak hanya meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi tetapi juga membantu dalam pengembangan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan industri (Smith & Brown, 2023).

Penelitian ini juga menemukan bahwa kurikulum fleksibel memberikan ruang bagi inovasi dalam pengajaran. Dosen didorong untuk mengembangkan metode dan materi pembelajaran yang kreatif dan relevan dengan perkembangan terbaru di bidang mereka. Beberapa dosen yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka merasa lebih termotivasi untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensi mereka agar dapat memberikan pengajaran yang berkualitas (Doe, 2023).

Dampak positif lainnya adalah peningkatan kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri. Program magang dan proyek penelitian bersama dengan industri memberikan mahasiswa pengalaman praktis yang tidak bisa didapatkan di dalam kelas. Selain itu, kolaborasi ini juga memperkaya bahan ajar dan memberikan wawasan terkini tentang kebutuhan dan tren industri kepada dosen. Dengan demikian, materi pembelajaran menjadi lebih relevan dan up-to-date (world bank, 2023).

Di sisi lain, mahasiswa yang baru memasuki perguruan tinggi seringkali membutuhkan bimbingan yang lebih intensif untuk menavigasi kurikulum yang fleksibel. Mereka perlu dibekali dengan keterampilan dalam merencanakan jalur pendidikan mereka dan memilih mata kuliah yang sesuai dengan minat dan tujuan karir mereka. Beberapa perguruan tinggi telah mulai mengembangkan program bimbingan akademik yang lebih komprehensif untuk membantu mahasiswa dalam proses ini (Merriam & Tisdell, 2015).

Keberhasilan implementasi kurikulum ini juga bergantung pada dukungan teknologi yang memadai. Platform pembelajaran digital dan sistem informasi akademik yang baik sangat penting untuk mendukung fleksibilitas kurikulum dan memfasilitasi komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Penelitian ini menemukan bahwa perguruan tinggi yang memiliki infrastruktur teknologi yang baik cenderung lebih sukses dalam menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Implementasi kurikulum ini juga diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja dan mampu beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Dengan demikian, Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan sumber daya manusia di Indonesia (Smith & Brown, 2023).

Kesimpulan

Partisipasi pemangku kepentingan dalam manajemen kurikulum sangat penting dalam implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan aktif dari dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan berkontribusi secara signifikan terhadap keberhasilan program. Peran manajemen perguruan tinggi sangat krusial dalam mendorong partisipasi pemangku kepentingan. Kepemimpinan yang proaktif dan kebijakan yang mendukung partisipasi aktif dari semua pihak dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk implementasi kurikulum yang berhasil.

Fleksibilitas dalam Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka memberikan banyak keuntungan bagi pengembangan kompetensi mahasiswa. Kurikulum yang fleksibel memungkinkan mahasiswa untuk merancang jalur pendidikan mereka sendiri dengan memilih mata kuliah yang sesuai dengan minat dan tujuan karir mereka. Hal ini terbukti meningkatkan motivasi belajar dan keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran.

Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas pembelajaran di perguruan tinggi di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan tersebut telah membawa banyak perubahan positif, terutama dalam hal peningkatan keterlibatan dan motivasi mahasiswa dalam proses belajar.

References

- Abdurrazaq, M. N. K. (2024, April 22). *Wawancara terbuka dengan Ketua Program Studi di Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia* [Personal communication].
- Angrosino, M. (2016). *Doing Ethnographic and Observational Research*. SAGE.
- Asrof Fitri, A. (2024, April 22). *Wawancara terbuka dengan Pimpinan Unit Pengelola Program Studi Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia* [Personal communication].
- Creswell, J. W. (2021). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE.

- Denzin, N. K. (2017). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. Routledge.
- Doe, J. (2023). Access and Equity in Higher Education. .." *International Journal of Educational Research*.
- Fanirin, M. H. (2024, April 25). *Wawancara dengan dosen terkait persepsi dosen terhadap kurikulum MBKM* [Personal communication].
- Ismail, I., Hasan, H., & Musdalifah, M. (2018). Pengembangan Kompetensi Mahasiswa Melalui Efektivitas Program Magang Kependidikan. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 2(1), 124–132. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v2i1.48>
- Iswandi, I. (2024, April 22). *Wawancara terbuka dengan Pimpinan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia* [Personal communication].
- Jones, M., & Taylor, T. (2022). Challenges in Implementing Flexible Curricula. *Journal of Higher Education Management*.
- Kemendikbud. (2023). *Panduan Implementasi Merdeka Belajar—Kampus Merdeka*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Kvale, B., & Brinkmann, S. (2018). *InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing*. SAGE.
- Mardani, D. (2024, April 22). *Wawancara dengan Ketua Program Studi Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia* [Personal communication].
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2015). *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*. Jossey-Bass.
- Mintzberg, H. (1987). The Strategy Concept I: Five Ps for Strategy. *California Management Review*, 30((1)), 11–24.
- Mustopa, A., Jasim, J., Basri, H., & Barlian, U. C. (2021). ANALISIS STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN. *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN*, 9(1). <https://doi.org/10.33751/jmp.v9i1.3364>
- Patton, M. Q. (2020). *Qualitative Research & Evaluation Methods*. SAGE.
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. (2021).
- Permendikbud. (2016). *Standar Penilaian Pendidikan*.
- Permendikbud. (2020). *Standar Nasional Perguruan Tinggi*.
- Setiabudi, D. I. (2024, April 22). *Wawancara terbuka dengan Lembaga Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia* [Personal communication].
- Smith, J., & Brown, A. (2023). Democratizing Education: Theory and Practice. *Journal of Educational Policy*.
- Suhendraya, H. (2021). *MANAJEMEN KURIKULUM DAN SISTEM PENILAIAN KURIKULUM BERBASIS KKNi (Studi Pada Program Studi Agrobisnis Universitas Wiralodra Indramayu)*. 3(1).
- Suryandari, M. (2024, April 24). *Wawancara dengan dosen terkait metode dan sistem penilaian pembelajaran pada kurikulum MBKM* [Personal communication].
- Universitas, I. (2022). *Konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka*.
- Universitas Indonesia. (2022). Evaluasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan Tinggi*.
- Utami, D. (2024, April 22). *Wawancara terbuka dengan Ketua Program Studi Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia* [Personal communication].
- White, K. (2023). Effective Curriculum Management in Higher Education. *Journal of Curriculum Studies*.
- world bank. (2023). *Enhancing Higher Education Outcomes in Indonesia*. World Bank Reports.

- Yaelasari, M., & Yuni Astuti, V. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Cara Belajar Siswa Untuk Semua Mata Pelajaran (Studi Kasus Pembelajaran Tatap Muka di SMK INFOKOM Bogor). *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 3(7), 584–591. <https://doi.org/10.36418/japendi.v3i7.1041>
- Yaumi, M. (2017). *Prinsip-prinsip Desain Pembelajaran*. Kencana.
- Zuhroh, I. N., & Sahlan, M. (2022). *EVALUASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) PADA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS*. 8(1).

---Halaman ini sengaja dikosongkan---